

Hubungan Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik

(Studi Eksplanatif terhadap Wartawan Anggota PWI Cabang Yogyakarta)

Elizabeth Elza Astari Retaduari

Lukas S. Ispandriarno

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl Babarsari No 6, Yogyakarta 55281

elzapoenya@gmail.com

Abstrak: Kebebasan pers sejak masa reformasi tak hanya berdampak positif. Ada sejumlah fenomena negatif yang muncul akibat kebebasan pers, seperti munculnya sejumlah koran kuning, pemberitaan yang berat sebelah dan menjamurnya wartawan ‘amplop’. Penelitian ini merupakan studi eksplanatif kuantitatif dengan menggunakan metode survei dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Unit analisis penelitian ini adalah wartawan PWI cabang Yogyakarta. Keanggotaan wartawan dalam organisasi pers tidak memiliki hubungan dengan pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik. Namun pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, dan penghasilan mampu mengontrol hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik.

Kata Kunci: *Kode Etik Jurnalistik, Keanggotaan, Organisasi Pers, Wartawan*

PENDAHULUAN

Pelanggaran kode etik yang dewasa ini sering muncul adalah menjamurnya wartawan ‘amplop’ dan terbitnya Koran kuning. Koran kuning banyak menjual dramatisasi dan sensasionalisme dalam penulisan beritanya. Selain itu aspek visual dari koran kuning juga berlebihan. Kontennya banyak berisi hal-hal cabul, artikel-artikel sepele dan dengan *headline* yang memberi efek menakutkan. Sementara menurut Ashadi Siregar wartawan ‘amplop’ merupakan wartawan ‘tamu tak diundang’ yang datang berombongan dan menunggu pembagian ‘angpao’ alias amplop di mana kelompok wartawan ini biasanya berasal dari media yang dianggap tidak jelas perusahaan persnya, namun kelompok ini tidak semata-mata wartawan tanpa surat kabar, (2006:152-153).

Terkait masalah 'amplop' sebenarnya juga sudah diatur oleh Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) dalam pasal 6: "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap". Hal yang mungkin terjadi adalah banyaknya pelaku media yang tidak mengetahui poin-poin ataupun aturan dalam profesi kerjanya. Hal tersebutlah yang menjadi landasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Menurut survei Dewan Pers tentang pengetahuan jurnalis Indonesia atas Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) pada tahun 2011, baru 42% wartawan yang membaca seluruh isi dari KEJI, (<http://unilubis.com/> diakses pada 28 Februari 2013).

Meski melanggar kode etik jurnalistik, fenomena tersebut seringkali terjadi. Dalam interaksi wartawan dengan narasumber khususnya pemerintah, budaya 'amplop' berlangsung bahkan kian dilembagakan atau dianggap wajar diterima sebagai 'hak' wartawan bukan 'pemberian' yang berpotensi mengubur independensi wartawan, (Masduki, 2003:86). Pertarungan antara idealisme dengan sesuatu materi yang didapat wartawan 'amplop' merupakan pilihan wartawan itu sendiri, namun hal tersebut menentukan seberapa besar kredibilitas mereka dan tentu saja jika hal tersebut sampai diketahui secara formal maka akan ada sanksi yang berat untuk wartawan.

Profesionalisme diperlukan untuk menjaga kinerja wartawan dalam memenuhi tugas jurnalistik. Etika diperlukan dalam menjaga profesionalisme. Etika berfungsi menjaga agar pelaku profesi tetap terikat (*committed*) pada tujuan sosial profesi, sehingga etika profesi dapat berfungsi memelihara agar profesi itu tetap dijalankan sesuai dengan harapan lingkungan sosialnya, (Siregar, 1998:226).

Organisasi pers sebagai organisasi profesi diperlukan dalam dunia jurnalistik. Ashadi Siregar menjelaskan lebih jauh mengenai pentingnya organisasi profesi. Menurutnya organisasi

profesi jurnalistik dapat membantu institusi jurnalistik dalam mengembangkan pelaku profesi yang berada di dalamnya. Sebagian dari beban kerja pemimpin redaksi untuk membina personil dalam institusinya baik bidang teknis maupun etis diambil alih oleh organisasi profesi (dalam Sulistyowati, 2004:124). Organisasi pers selayaknya berperan dalam penegakkan etika jurnalistik dengan memiliki komitmen untuk menegakkan kode etik jurnalistik dan bekerja keras untuk memastikan anggotanya melaksanakan kode etik jurnalistik, (Sulistyowati, 2004).

Perilaku yang dilakukan oleh jurnalis/wartawan seharusnya terbatas dalam koridor Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan kode etik merupakan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah hubungan keanggotaan wartawan dalam Organisasi Pers dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik?, dan yang kedua adalah apakah pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, penghasilan, dan atau sosial budaya dapat mengontrol hubungan antara keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan keanggotaan wartawan dalam Organisasi Pers dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik.

KERANGKA TEORI

I. Organisasi Pers

Terdapat banyak teori mengenai organisasi, namun ada satu teori yang menjelaskan tentang individu dalam organisasi. Teori organisasi perilaku atau *The Behaviour Theory of Organization* adalah suatu teori yang memandang organisasi dari segi perilaku anggota

organisasi, (Wursanto, 2003:265). Wursanto juga menjelaskan, teori ini memandang setiap anggota mempunyai watak, temperamen, cita-cita, keinginan yang berbeda-beda, yang mengakibatkan perilaku dari setiap anggota organisasi berbeda-beda.

Sementara pers sendiri menurut UU No. 40 tahun 1999 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia, (Seri Pustaka Yustisia, 2003:8). Dalam UU tentang pers tersebut disebutkan bahwa organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers (pasal 1:5).

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana keanggotaan dalam organisasi pers mempengaruhi pengetahuan individu yang tergabung dalam organisasi tersebut, dalam hal ini wartawan, tentang Kode Etik Jurnalistik. Teori organisasi perilaku melihat bagaimana organisasi mengarahkan para anggota untuk berpikir, bersikap dan bertindak laku.

I. 1. Perilaku Organisasi

Menurut Stephen P. Robbins (2006:10), perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi.

Seperti yang diungkapkan Wursanto, mempelajari perilaku organisasi berarti berusaha memahami perilaku manusia atau individu. Robbins mengungkapkan ada beberapa faktor perilaku individu yang dapat mempengaruhi kinerja atau kepuasan karyawan, (2006:47-56).

Karyawan di sini adalah anggota organisasi. Faktor-faktor tersebut yakni:

1) Karakteristik Biografis (Usia, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Masa Kerja)

2) Kemampuan

Kemampuan di sini merujuk pada kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan di sini dibagi menjadi:

- a. Kemampuan intelektual: kapasitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mental
- b. Kemampuan Fisik: kemampuan menjalankan tugas yang menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan, dan karakteristik-karakteristik serupa

Kemampuan dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki anggota PWI sebagai anggota dalam organisasi pers tersebut. Dalam hal ini berupa keanggotaan-keanggotaan wartawan di dalam PWI.

3) Pembelajaran

Pembelajaran di sini didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini berupa pembelajaran dalam ranah jurnalistik yang didapat wartawan sebagai anggota selama ketergabungannya di PWI.

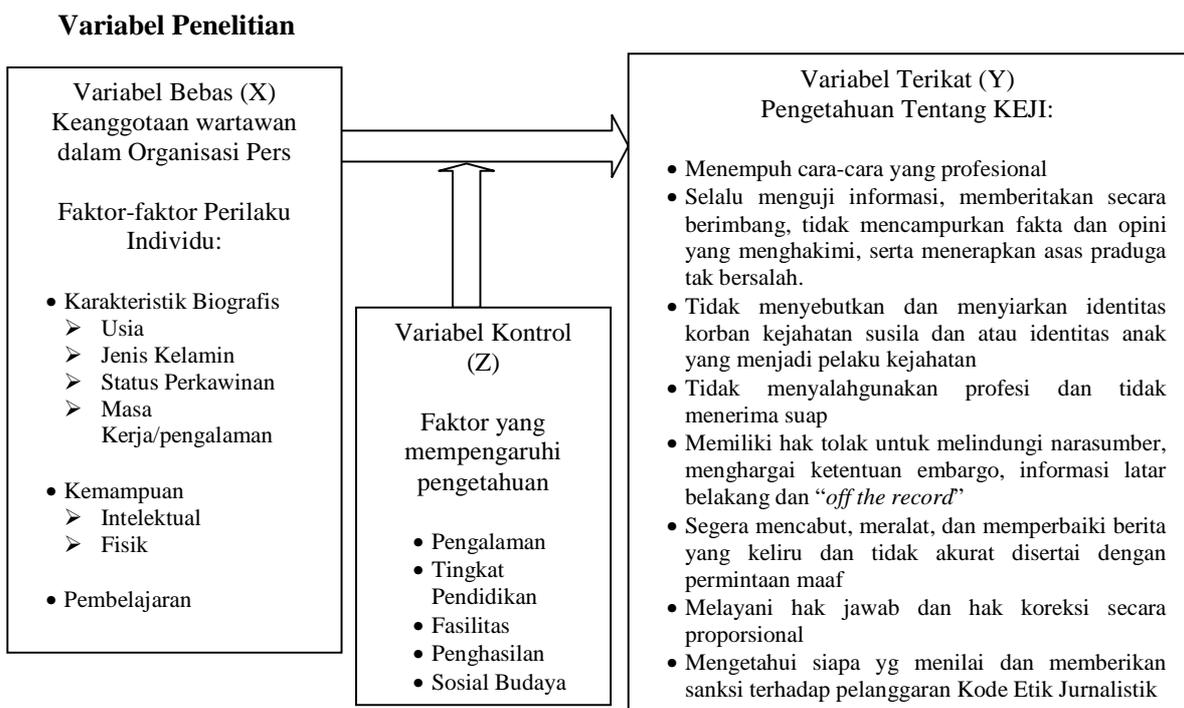
II. Pengetahuan Tentang Kode Etik Jurnalistik

Menurut Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya yang berjudul *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku* (2007:140), pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behaviour*). Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Menurut Notoatmodjo (2003:24), pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pengalaman, tingkat pendidikan, keyakinan, fasilitas, penghasilan, social budaya.

Dalam penelitian ini, pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik merupakan wujud dari etika. Tokoh pers Jakob Oetama

menggambarkan perihal etika itu sebagai wujud pertanggungjawaban pers yang merupakan pertanggungjawaban dari dalam, dari wartawan, dari pemilik dan pengelola pers, dari pers sebagai institusi, (dalam Siregar, 2005:11). Kode etik umumnya dirumuskan dan dikeluarkan oleh organisasi atau asosiasi profesi. Kode artinya tanda (*sign*) yang secara luas diartikan ”bangunan simbolik”. Adapun syarat perumusan sebuah kode etik ia harus bersifat rasional, tetapi tidak kering emosi. Kode etik harus konsisten tetapi tidak kaku (Masduki, 2003:49).

Terdapat berbagai macam aturan kode etik jurnalistik independen (diluar UU atau peraturan pemerintah) seperti, Kode Etik PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), P3SPS untuk jurnalistik elektronik. Namun secara umum aturan tersebut dijelaskan secara terperinci dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi sebagai pelindung kemerdekaan pers. Penulis membatasi pasal-pasal dalam KEJI yang digunakan untuk penelitian ini pada pasal yang mengatur mengenai teknis wartawan dalam membuat berita yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 10, pasal 11 dan poin mengenai sanksi atas pelanggaran.



METODE

Penelitian ini merupakan studi eksplanatif kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Unit analisis penelitian ini adalah wartawan PWI cabang Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Kuesioner atau angket sebagai alat pengumpulan data dan metode analisis korelasi. Sampel dalam penelitian ini ada 76 orang responden.

HASIL

Pembagian Kategori Pengetahuan, (Suharsimi, 2009:239) : Rendah < 55%, sedang 56%-75%, tinggi > 75%-100%

Temuan data mengenai pengetahuan responden tentang kode etik jurnalistik adalah, pengukuran tingkat pengetahuan dari 76 responden dalam penelitian ini menggunakan nilai rata-rata total persen, dan dari hasil pengukuran diketahui bahwa nilai rata-rata total persennya adalah sebesar 76,94%. Nilai rata-rata total persen tersebut jika dimasukkan dalam pembagian kategori termasuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya, untuk melihat gambaran tingkat pengetahuan secara detail dari 76 responden adalah sebagai berikut:

Tingkat Pengetahuan Responden

	Frekuensi	Persen
Kurang	1	1.3
Sedang	34	44.7
Tinggi	41	53.9
Total	76	100.0

Mayoritas responden dalam penelitian ini, yakni 41 orang (53,9%) tingkat pengetahuannya tergolong dalam kategori tinggi (76,94%).

Analisis korelasi antar-variabel menemukan hasil:

1. Tidak ada hubungan antara variabel Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers (X) dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (Y)

2. Ada hubungan antara lama bergabung di PWI (indikator karakteristik biografis) dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik yang dikontrol oleh tingkat pendidikan kategori rendah dengan signifikansi 0,046.
3. Ada hubungan antara lama bergabung di PWI (indikator karakteristik biografis) dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik yang dikontrol oleh fasilitas kategori rendah dengan signifikansi 0,036.
4. Ada hubungan antara lama bergabung di PWI (indikator karakteristik biografis) dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik yang dikontrol oleh penghasilan kategori rendah dengan signifikansi 0,035.
5. Ada hubungan antara pernah menjadi pengurus di PWI (indikator karakteristik biografis) dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik yang dikontrol oleh tingkat pendidikan kategori tinggi dengan signifikansi 0,019 .
6. Ada hubungan antara status keanggotaan di PWI (indikator karakteristik biografis) dengan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik yang dikontrol oleh pengalaman kategori rendah dengan signifikansi 0,002.

PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan kode etik jurnalistik responden dalam penelitian ini tergolong dalam kategori tinggi (76,94%). Berdasarkan pengukuran, mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi (76,94%), yakni 41 orang atau (53,9%). Pengetahuan itu sendiri merupakan salah satu domain sebagai pembentuk perilaku. Dengan adanya pengetahuan yang tinggi ini diharapkan perilaku seorang pekerja media massa dalam hal ini wartawan sejalan dengan pengetahuan yang dimilikinya sehingga mampu menghasilkan berita yang benar-benar sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI).

Selain itu berdasarkan hasil analisis korelasi, keanggotaan wartawan dalam organisasi pers (karakteristik biografis, kemampuan, pembelajaran) tidak mempengaruhi tingkat pengetahuan responden. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki responden tidak ada hubungannya dengan perbedaan karakteristik biografis (usia, jenis kelamin, status perkawinan dan masa kerja), kemampuan (intelektual dan fisik) serta pembelajaran.

Secara teori menurut Notoatmodjo (2003:24), pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pengalaman, tingkat pendidikan, keyakinan, fasilitas, penghasilan, dan sosial budaya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) yang dimiliki oleh wartawan ternyata tidak ada hubungannya dengan karakteristik biografis (usia, jenis kelamin, status perkawinan dan masa kerja), kemampuan (intelektual dan fisik) serta pembelajaran. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun karakteristik biografis, kemampuan, dan pembelajaran yang dimiliki berbeda-beda tetapi memiliki pengetahuan yang hampir sama.

Sedangkan berdasarkan hasil analisis hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi pers (karakteristik biografis, kemampuan, pembelajaran) dengan pengetahuan responden tentang kode etik jurnalistik yang dikontrol oleh pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, penghasilan dan sosial budaya (faktor yang mempengaruhi pengetahuan) menunjukkan beberapa hasil yang signifikan. Hasil analisis tersebut yakni:

- i. Tingkat pendidikan rendah mampu mengontrol hubungan lama bergabung di PWI (indikator karakteristik biografis poin masa kerja) dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik
- ii. Fasilitas rendah mampu mengontrol hubungan lama bergabung di PWI (indikator karakteristik biografis poin masa kerja) dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik

- iii. Penghasilan rendah mampu mengontrol hubungan lama bergabung di PWI (indikator karakteristik biografis poin masa kerja) dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik
- iv. Tingkat pendidikan tinggi mampu mengontrol hubungan pernah menjadi pengurus PWI (indikator karakteristik biografis poin masa kerja) dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik
- v. Pengalaman rendah mampu mengontrol hubungan status keanggotaan di PWI (indikator karakteristik biografis poin masa kerja) dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik.

Hubungan antara lama bergabung di PWI dengan pengetahuan pada kelompok responden dengan tingkat pendidikan yang rendah signifikan. Wartawan yang sudah lebih lama bergabung di PWI diasumsikan telah memiliki pengalaman yang lebih luas sehingga dari proses belajar melalui pengalaman tersebut akhirnya meningkatkan pengetahuan khususnya tentang Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI), walaupun pendidikannya rendah.

Berdasarkan wawancara dengan responden no 14 pada 25 Juli 2013, responden sudah bergabung di PWI selama lebih dari 10 tahun. Responden yang mengenyam pendidikan hanya sampai SMA tersebut pada dasarnya paham mengenai bekerja sesuai dengan aturan kode etik jurnalistik. Ia merasa banyak belajar banyak dari PWI, apalagi karena ia juga sering mengikuti pelatihan, seminar dan atau *workshop* yang diselenggarakan oleh PWI berkenaan dengan kode etik jurnalistik. Meski pendidikan responden rendah, namun ternyata faktor-faktor penunjang lain yang didapat responden selama bergabung di PWI dapat meningkatkan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik.

Hubungan antara lama bergabung di PWI dengan pengetahuan pada kelompok responden dengan fasilitas yang rendah menunjukkan bahwa responden yang lama bergabung di PWI di bawah 3 tahun memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Wawancara peneliti dengan responden

nomer 54 pada 3 September 2013 menghasilkan pernyataan responden bahwa ia belum lama bergabung di PWI. Responden tersebut mengatakan bahwa ia masih cukup hafal tentang kode etik jurnalistik karena ia belum terlalu lama mengikuti ujian masuk PWI dan ujian kompetensi wartawan yang di dalamnya juga ada tes mengenai kode etik jurnalistik. Ia pun berkata bahwa ia tidak mendapatkan fasilitas yang berhubungan dengan kode etik jurnalistik dari tempatnya bekerja, sehingga untuk mempelajarinya ia mencari sendiri fasilitas tersebut. Menurut responden tersebut, kode etik jurnalistik sangat penting dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Walaupun responden belum lama bergabung di PWI dan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai mengenai kode etik jurnalistik dari tempatnya bekerja, selama wartawan memiliki dedikasi yang tinggi dalam pekerjaannya maka wartawan tersebut akan mencari cara untuk meningkatkan pengetahuannya tentang kode etik jurnalistik.

Hubungan antara lama bergabung di PWI dengan pengetahuan pada kelompok responden dengan tingkat penghasilan yang rendah signifikan. Hal ini menginformasikan bahwa responden dengan penghasilan yang rendah dan telah lama bergabung di PWI selama 2 tahun memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada responden yang lain. Wawancara peneliti dengan responden nomer 19 pada 30 Juli 2013 menginformasikan bahwa ia baru saja bergabung dengan PWI, tidak lama setelah ia diterima kerja di media sehingga penghasilannya belum terlalu besar karena ia juga belum terlalu lama lulus kuliah. Hasil wawancara tersebut juga menginformasikan bahwa responden memiliki pengetahuan tentang kode etik jurnalistik yang cukup tinggi karena responden mempelajarinya dengan seksama saat ingin bergabung ke dalam PWI dan saat ia mengikuti ujian kompetensi wartawan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bergabungnya wartawan dalam PWI memiliki dampak positif terhadap pengetahuan tentang kode etik jurnalistik, meski waktunya belum terlalu lama.

Hubungan antara pernah menjadi pengurus PWI dengan pengetahuan pada kelompok responden dengan tingkat pendidikan yang tinggi signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan tinggi meskipun belum pernah menjadi pengurus PWI tetapi memiliki pengetahuan yang tinggi tentang kode etik jurnalistik. Sementara yang pernah menjadi pengurus PWI lebih banyak yang memiliki pengetahuan sedang. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan tinggi dapat mempengaruhi pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik. Dengan mengenyam pendidikan tinggi, responden memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang lebih mengenai kode etik jurnalistik.

Hubungan antara status keanggotaan di PWI dengan pengetahuan pada kelompok responden dengan pengalaman yang rendah adalah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan status keanggotaan ternyata yang termasuk anggota muda memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi daripada anggota biasa dan luar biasa. Hasil ini cukup menarik karena dapat disimpulkan bahwa anggota biasa dan anggota luar biasa yang lebih senior dibanding anggota muda justru memiliki pengetahuan kode etik jurnalistik yang lebih rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa justru wartawan yang lebih junior di PWI (belum terlalu lama bergabung di PWI) memiliki pengetahuan yang lebih tentang kode etik jurnalistik daripada wartawan yang lebih senior. Wartawan junior yang masih lebih muda banyak yang masih memiliki idealis tinggi, terutama mengenai bidang pekerjaannya. Mereka masih memiliki dedikasi yang tinggi akan etika profesional dalam dunia jurnalistik dan bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian berlangsung (Juli-September 2013), peneliti banyak menemukan wartawan junior yang tidak segan-segan menyatakan bahwa tidak ada pembenaran dalam pelanggaran kode etik jurnalistik, apapun alasannya.

Peneliti juga menemukan beberapa hal menarik dari hasil wawancara selama peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Hal-hal menarik tersebut seperti adanya kubu-kubu bagi wartawan-wartawan amplop, ada yang bersedia menerima amplop namun bukan dari narasumber, dan ada kubu yang memang sengaja mencari amplop dari sumber manapun.

Selain itu, peneliti juga menemukan banyak pernyataan dari responden bahwa mereka memang menerima amplop, namun hal tersebut tidak mempengaruhi substansi atau isi berita. Ada salah satu pernyataan dari responden bahwa amplop sudah menjadi hal yang wajar bagi wartawan karena penghasilan yang diterima dari media tempat mereka bekerja sangat kecil. Responden tersebut sebenarnya mengerti bahwa wartawan tidak boleh menerima amplop, namun ia tetap saja menerimanya karena terdesak oleh tuntutan ekonomi. Bahkan responden tersebut mengaku sering menjadi koordinator bagi wartawan amplop. Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, peneliti menemukan bahwa pada dasarnya responden memahami atau tingkat pengetahuannya tentang kode etik jurnalistik cukup tinggi, namun karena ada banyak faktor dan atau alasan, wartawan tidak mematuhi.

Hasil wawancara dengan para responden juga mampu menegaskan bahwa keanggotaan mereka dalam PWI yang dilihat berdasarkan karakteristik biografis, kemampuan, dan pembelajaran tidak ada hubungannya dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik. Hal tersebut dikarenakan bahwa pada dasarnya mayoritas dari mereka mendapatkan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik dari berbagai sumber, salah satunya adalah dari bangku perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang mengambil studi di bidang komunikasi atau jurnalistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik. Sementara temuan lain dalam penelitian ini yakni bahwa pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas dan penghasilan

mampu mengontrol hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik. Sedangkan sosial budaya tidak mampu mengontrol hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik.

Uraian pembahasan di atas menunjukkan bahwa temuan penelitian ini sejalan dengan teori Notoatmodjo (2003:24) yang mengatakan bahwa pengetahuan dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Beberapa di antaranya adalah pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, dan penghasilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan kode etik jurnalistik responden dalam penelitian ini tergolong dalam kategori tinggi (76,94%). Berdasarkan pengukuran, mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan yang tergolong dalam kategori tinggi (76,94%), yakni 41 orang (53,9%). Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami ketentuan Kode Etik Jurnalistik Indonesia dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis korelasi, variabel keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan indikator karakteristik biografis (usia, jenis kelamin, status perkawinan dan masa kerja), kemampuan (intelektual dan fisik) serta pembelajaran tidak memiliki hubungan dengan variabel pengetahuan tentang kode etik jurnalistik. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki responden tentang kode etik jurnalistik tidak ada hubungannya dengan perbedaan karakteristik biografis, kemampuan, dan serta pembelajaran.

Sementara hasil analisis hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi pers (karakteristik biografis, kemampuan, pembelajaran) dengan pengetahuan responden tentang kode etik jurnalistik yang dikontrol oleh pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, penghasilan dan sosial budaya (faktor yang mempengaruhi pengetahuan) diketahui bahwa:

- i. Tingkat pendidikan rendah mampu mengontrol hubungan lama bergabung di PWI (masuk dalam poin masa kerja/pengalaman) dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik
- ii. Fasilitas rendah mampu mengontrol hubungan lama bergabung di PWI (masuk dalam poin masa kerja/pengalaman) dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik
- iii. Penghasilan rendah mampu mengontrol hubungan lama bergabung di PWI (masuk dalam poin masa kerja/pengalaman) dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik
- iv. Tingkat pendidikan tinggi mampu mengontrol hubungan pernah menjadi pengurus PWI (masuk dalam poin masa kerja/pengalaman) dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik
- v. Pengalaman rendah mampu mengontrol hubungan status keanggotaan di PWI (masuk dalam poin masa kerja/pengalaman) dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik.

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik. Sementara temuan lain dalam penelitian ini yakni bahwa pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas dan penghasilan mampu mengontrol hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik. Sedangkan sosial budaya tidak mampu mengontrol hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik.

Saran

1. Akademis

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi ilmu komunikasi khususnya konsentrasi studi jurnalistik bahwa pengetahuan tidak memiliki hubungan dengan keanggotaan dalam organisasi pers dengan indikator karakteristik biografis, kemampuan serta pembelajaran tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Pers, PWI dan organisasi pers lainnya serta wartawan mengenai pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik yang dapat dipengaruhi oleh pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, dan penghasilan. Selain itu juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk organisasi pers, khususnya PWI untuk lebih memperhatikan pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas dan penghasilan anggota-anggotanya karena faktor-faktor tersebut mampu mempengaruhi pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Masduki. 2003. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta : UII Press.
- Notoatmodjo, Soekijo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007. *Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Indeks
- Seri Pustaka Yustisia. 2003. *Hukum Jurnalistik*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius
- , 2006. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Siregar, R.H. 2005. *Setengah Abad Pergulatan Etika Pers*. Jakarta: Dewan Kehormatan PWI
- Suharsimi, Arikunto. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Wursanto, Ig. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Jurnal:

- Sulistiyowati, Fadjarini. 2004. *Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik*, (Online), (http://jurnal.uajv.ac.id/jik/files/2012/05/JIK-Vo3-No2-2006_2.pdf), diakses pada 2 Maret 2013.